

Jurnal Malikussaleh Mengabdi

Volume 3, Nomor 2, Oktober 2024, Halaman 254-260
e-ISSN: 2829-6141, URL: <https://ojs.unimal.ac.id/jmm>
DOI: <https://doi.org/10.29103/jmm.v3n2.18879>

Pelatihan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren Darul Falah

Naz'aina*, Jariah Abubakar, Arliansyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe

*Email korespondensi: nazaina@unimal.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan keuangan sangat penting bagi setiap organisasi, baik organisasi yang berorientasi laba maupun non laba. Pengelolaan keuangan non laba semula diatur dalam standar akuntansi yaitu PSAK 45, dan saat ini mengalami perubahan dan diatur dalam ISAK 35. Organisasi non laba yang diatur dalam ISAK 35 antara lain adalah pondok pesantren yang bernaung dalam Yayasan. Masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pondok pesantren, antara lain, kompetensi sumberdaya manusia yang masih kurang tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pelatihan pengelolaan dan pelaporan keuangan ini dilaksanakan di pondok Pesantren Darul Falah Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara dengan tujuan memberikan pemahaman tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Pelatihan dilakukan selama 2 hari dalam bentuk pemaparan materi dan pelatihan penyusunan laporan keuangan. Setelah pelatihan dilakukan menunjukkan bahwa peserta sudah memahami dan mampu untuk menyusun laporan keuangan (Laporan Posisi Keuangan, Laporan Penghasilan Komprehensif, Laporan Perubahan Aset Neto, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan). Untuk kelanjutan kegiatan ini perlu adanya pendampingan kepada mitra dalam penyusunan Laporan Keuangan Pondok Pesantren serta pelatihan berkelanjutan yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, Pemerintah, maupun swasta.

Kata kunci: Pengelolaan, Laporan keuangan, Pondok pesantren

PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan proses, cara, perbuatan yang membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak berupa akal, ikhtiar atau upaya untuk mengembangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat baik material maupun spiritual guna mencapai cita-cita dan tujuan suatu bangsa. Proses pemberdayaan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dengan keikutsertaan dan partisipasi masyarakat sehingga berdayaguna (Margayaningsih, 2018). Pemberdayaan dapat dilakukan pada lingkungan kampus maupun diluar kampus. Pemberdayaan diluar kampus dapat dilakukan pada pondok pesantren.

Pondok pesantren dikenal sebagai model pendidikan yang multi aspek dalam pola pembelajarannya. Model pendidikan pondok pesantren mampu mempertahankan keberlangsungan dirinya (*survival system*). Selain memahami ilmu agama, santri juga mendapat pendidikan kepemimpinan yang alami, kemandirian, kesederhanaan, ketekunan, kebersamaan, kesetaraan dan sikap positif lainnya. (Gurendrawati, Murdayanti, Indriani, 2020). Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang berbentuk pondok atau asrama, di mana para santri menimba ilmu untuk belajar hidup dan bermasyarakat dalam berbagai segi dan aspeknya (IAI, 2018).

Pondok pesantren merupakan badan hukum berbentuk yayasan, sehingga masuk

karakteristik sebagai entitas pelaporan. Pondok pesantren wajib membuat laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait posisi keuangan dan kinerja pondok pesantren dan sebagai pertanggungjawaban pengurus yayasan bagi pengguna laporan keuangan (Listiyowati, 2021).

Laporan keuangan bagi pondok pesantren sebagai instrumen yang berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas organisasi. Penerapan akuntabilitas dalam Islam memenuhi persyaratan hukum dan melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT (Basri et al., 2016). Sebagai entitas publik, pondok pesantren harus transparan terhadap segala aktivitasnya, termasuk transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan (Ahyar, 2020). Pondok pesantren harus mampu mengelola aset yang dimilikinya. Terutama aset-aset likuid yang berupa dana atau uang, termasuk biaya pendidikan (uang makan, uang madrasah, dll), dana ZISWAF, dana bantuan pemerintah, unit usaha pesantren, dan lain sebagainya. Pengelolaan dana yang cukup besar oleh pesantren harus disertai dengan pelaporan dan dokumentasi yang baik. Hal ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pondok pesantren kepada para pemangku kepentingan (Ahyar, 2020).

Kegiatan akuntansi dipandang sebagai kegiatan yang tidak bertentangan dengan keyakinan agama dan misi organisasi. Namun, praktik akuntansi di pondok pesantren kurang berkembang, dan akuntabilitas keuangan yang ditunjukkan oleh manajemen masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat (Basri & Siti-Nabiha, 2016). Transparansi aktivitas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh pondok pesantren berdampak pada reputasi yang baik dan pada akhirnya akan semakin dipercaya oleh masyarakat luas yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi, kurangnya persiapan laporan keuangan yang sesuai dengan kaidah pondok pesantren mengakibatkan penyusunan laporan keuangan pondok pesantren yang berbeda-beda. Pondok pesantren masih belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi (Ahyar, 2020)

Dalam tata kelola keuangan pondok pesantren, pada awalnya Bank Indonesia bersama Kompartemen Akuntan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia meluncurkan Pedoman Akuntansi Pesantren pada bulan Mei 2018, yang didasarkan pada SAK-ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) dan SAK Syariah (Standar Akuntansi Keuangan Syariah). Tetapi pedoman ini belum mengikat bagi pondok pesantren. Artinya, pondok pesantren bisa membuat laporan keuangan sesuai dengan karakter dan kebijakan masing-masing. Pedoman ini juga memberikan penjelasan terkait dengan format dan komponen laporan keuangan berdasar PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 45). Namun mulai tahun 2019 Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) telah menerbitkan ISAK 35 (Interprestasi Standar Akuntansi Keuangan 35), merupakan Standar Akuntansi Keuangan bagi organisasi non laba dan berlaku secara global. ISAK 35 mulai berlaku efektif tahun buku 1 Januari 2020. Keuntungan penggunaan ISAK 35 adalah Pondok pesantren lebih mudah beroperasi secara global, dapat meningkatkan kredibilitas dimata investor, pemberi dana dan pemangku kepentingan lainnya, serta lebih memungkinkan perbandingan dan informasi lebih transparan (Afridayani, et al, 2022). Transparansi dan akuntabilitas pondok pesantren masih kurang karena kurangnya pemahaman terhadap standar keuangan yang ada (Murdayanti, 2019)

Pondok pesantren Darul Falah Desa Paloh Igeuh Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara didirikan oleh Abuya Tgk. Muhammad Idris Muda Tahun 1980. Sampai saat ini Pesantren Darul Falah telah memiliki 450 santri dengan jumlah guru dan karyawan sebanyak 40 orang. Dan mempunyai pengelolaan usaha yaitu kantin dan foto copy. Berdasarkan survey lapangan pondok Pesantren Darul Falah telah menunjukkan adanya pengelolaan dan laporan keuangan dengan baik, namun pengelolaan masih sederhana seperti buku kas masuk, buku kas keluar, aktivitas masih diprioritaskan pada

kualitas program seperti pondok pesantren yang lain (Wahyuningsih, 2018) sehingga laporan keuangan tidak dapat menjadi bahan perbandingan dan tidak dapat digunakan sebagai bahan acuan oleh pihak eksternal.

Pengelolaan keuangan pondok pesantren belum mengacu pada ISAK 35, sehingga laporan keuangan belum memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para pemberi dana secara terperinci (Niati. A, et al, 2029). Hal ini disebabkan masih sedikit pengelola pondok pesantren yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi khususnya akuntansi sehingga kurang memahami proses akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku.

Pelatihan ini dilakukan agar pengelola pondok pesantren dapat menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang transparan, akuntabilitas dan efektifitas (Arifin, 2016).

Laporan Keuangan Dalam ISAK 35

Menurut (ISAK No. 35), laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba yang mencakup

1. Laporan Posisi Keuangan menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, serta aktiva bersih, dan informasi mengenai hubungan unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Pengungkapan dan informasi dalam laporan posisi keuangan serta bentuk informasi lainnya dapat membantu para penyumbang, anggota entitas nonlaba, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menilai (a) Kemampuan entitas nonlaba dalam memberikan jasa secara berkelanjutan, (b) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajiban, dan kebutuhan pendanaan eksternal.
2. Laporan Penghasilan Komprehensif adalah untuk menunjukkan jumlah surplus (defisit) dan penghasilan komprehensif lain. Laporan ini menyediakan informasi mengenai (a) Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah pendapatan; (b) Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain mengenai jumlah beban; (c) Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa. Penghasilan Komprehensif memuat informasi mengenai penghasilan komprehensif tanpa pembatasan dari pemberi sumber daya dan penghasilan dengan pembatasan dari pemberi sumber daya.
3. Laporan Perubahan Aset Neto menyajikan informasi penghasilan komprehensif lain tersebut sesuai dengan kelas aset netonya (misalnya jika penghasilan komprehensif lain berasal dari aset neto dengan pembatasan, maka disajikan dalam kelas aset neto dengan pembatasan).
4. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam satu periode. Informasi arus kas yang disajikan dalam laporan keuangan berguna untuk menilai kemampuan organisasi dalam menghasilkan kas dan setara kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang arus kas masa depan dari berbagai organisasi.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan pengungkapan yang diwajibkan yang menyebabkan laporan keuangan lainnya wajib disajikan. CaLK menyediakan informasi yang dianjurkan untuk diungkapkan oleh entitas berorientasi nonlaba.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan mitra yaitu keterbatasan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Maka dalam pemberdayaan santri pondok pesantren adalah sebagai berikut :

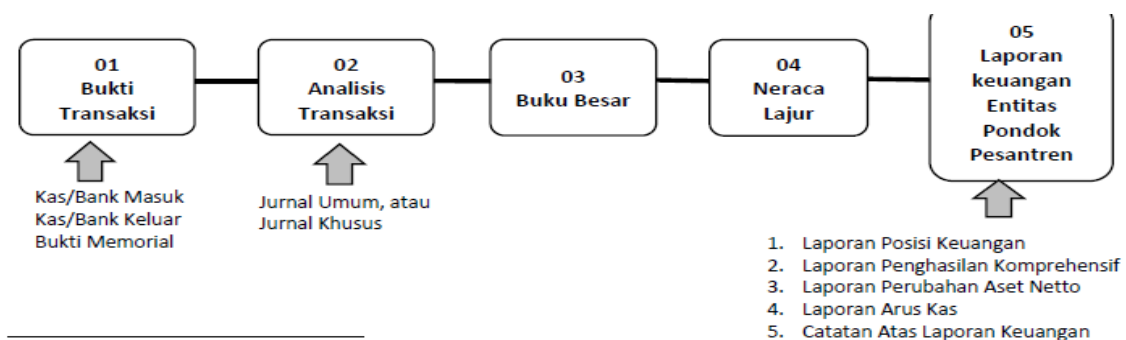
1. Tahap Identifikasi, pada tahap ini dilakukan kajian dari sisi empiris bagaiman

- pentingnya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan pondok pesantren yang dapat dimengerti oleh para *stakeholder*.
2. Tahap Pemilihan Mitra, pada tahap ini dilakukan pemilihan mitra yaitu santri pada tingkat atas yang sedang menyelesaikan studi dan guru-guru yang diberikan tugas untuk mengelola keuangan pesantren. Mitra ini memiliki potensi untuk dapat memahami dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pondok pesantren sesuai dengan standar yang berlaku sehingga informasi terkait dengan pondok pesantren lebih akurat.
 3. Tahap Pelatihan, pada tahap ini dilakukan pelatihan. Pelatihan akan dilaksanakan selama 2 hari dengan metode *workshop* dimana hari pertama tim pelaksana kegiatan pengabdian memaparkan teori-teori dan konsep serta praktik dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pondok pesantren sesuai dengan standar yang berlaku. Hari kedua dilaksanakan pelatihan penyusunan dan pelaporan keuangan pondok pesantren.
 4. Tahap Pendampingan, pada tahap ini melakukan pendampingan dalam proses penyusunan laporan keuangan pondok pesantren. Berdasarkan permintaan dari mitra, tim pengabdian akan menyediakan waktu untuk melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan pondok pesantren.

Pelatihan dilaksanakan pada Pesantren Darul Falah dengan menggunakan peralatan laptop, papan tulis, modul pelatihan dan infocus untuk memaparkan secara jelas teori-teori dan konsep tentang pelaporan keuangan pondok pesantren. Pada hari kedua mengadakan pelatihan penyusunan pelaporan keuangan dalam bentuk modul pelatihan. Mitra dalam pelatihan ini adalah guru, dan bagian pengelolaan keuangan pondok pesantren Darul Falah serta mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Malikussaleh

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini sangat bermanfaat bagi pengelola keuangan pondok pesantren. Awalnya para peserta belum paham tentang teori-teori dan konsep dasar dalam penyusunan laporan keuangan pondok pesantren. Unsur-unsur yang ada di setiap laporan keuangan seperti kas, piutang, persediaan, aktiva tetap, hutang, pendapatan dan lain-lain. penjelasan tentang tahapan (siklus akuntansi) mulai dari identifikasi transaksi, pencatatan, posting, neraca lajur, penyesuaian dan penyajian laporan keuangan.



Gambar 1. Siklus Akuntansi Keuangan Pondok Pesantren

Pada awal pelatihan peserta masih sulit untuk memahami materi yang diberikan. Hal ini dapat dimaklumi karena hanya sedikit peserta yang memiliki latar belakang akuntansi, sehingga kurang memahami teori-teori dan konsep dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Setelah mengikuti pelatihan ini para peserta sudah memahami teori dan konsep tentang penyusunan laporan keuangan pondok pesantren walaupun belum maksimal. Dengan memahami teori dan konsep, peserta mampu untuk menyusun laporan keuangan pondok pesantren yaitu: laporan posisi keuangan, laporan Penghasilan komprehensif, Laporan perubahan asset netto, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan Keuangan.

Pembukaan pelatihan dilakukan dengan pemberian kata sambutan oleh Ibu Sarmi Spd sebagai kepala MTsS Darul Falah dilanjutkan dengan pemamparan materi oleh tim pengabdian.



Gambar 2. Kata sambutan oleh ibu Sarmi Spd Gambar 3. Pemaparan materi oleh Tim Pengabdian

Pelatihan selama 2 hari tidak mencukupi untuk memahami secara maksimal tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan pondok pesantren. Diperlukan pendampingan yang lebih intensif supaya pengabdian ini lebih bermanfaat. Selain itu perlu diadakan pelatihan yang berkelanjutan tidak hanya dilakukan oleh perguruan tinggi tetapi juga oleh pemerintah maupun swasta dan untuk pondok pesantren secara keseluruhan.

Peran aktif pimpinan pondok pesantren sangat membantu untuk penyiapan laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi tanggungjawab setiap pimpinan organisasi. Laporan Keuangan merupakan salah satu dasar penilaian organisasi dan sebagai dasar pertimbangan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi (pondok pesantren) untuk memberikan dananya (Naz'aina, Raza, Murhaban, 2023)



Gambar 4. Foto Bersama pada penutupan acara

KESIMPULAN

Kegiatan ini hanya melibatkan satu pondok pesantren yang belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku. Menjadi penting untuk melakukan kegiatan yang serupa bagi banyak pondok pesantren guna peningkatan kesadaran atas pentingnya penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini diharapkan tidak berhenti pada pemaparan materi saja dan pelatihan yang hanya 2 hari, tetapi perlu pendampingan dan tindak lanjut yang berkesinambungan. Yayasan merupakan bagian dari organisasi non laba dimana proses penyusunan laporan keuangannya berdasarkan ISAK 35. Pondok Pesantren Darul Falah tergolong dalam entitas non laba belum menerapkan ISAK 35 dalam penyusunan laporan keuangannya. Minimnya pengetahuan dan latar belakang pendidikan peserta yang berasal dari non akuntansi menyebabkan adanya hambatan dalam penerapan ISAK 35. Perlunya pelatihan yang berkelanjutan tentang pelaporan keuangan pondok pesantren yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, pemerintah, maupun swasta.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Malikussaleh untuk mendanai kegiatan ini yang bersumber dari PNBPN Universitas Malikussaleh tahun 2024

DAFTAR PUSTAKA

- Afridayani, A., Pratiwi, A. P., Purwatiningsih, P., Ahnaf, T. Q., & Laelani, A. (2022). Implementasi ISAK 35 Pada Pelaporan Keuangan SDIT Permata Gemilang. *KUAT: Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 4(1), 62-67.
- Ahyar, M. K. (2020). Tantangan Pondok Pesantren Menuju Lembaga Pendidikan Islam yang Akuntabel. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).
- Basri, H & A.K.Siti Nabihah and Majid, M.S.A(2016).Accounting and Accountability in Religious Organizations: An Islamic Contemporary Scholar'Prespective, Gajah Mada International Journal of Business, 8(2), May August 2016, 207 - 230
- Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Pesantren Efektif per Mei 2018* (Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia, 2018)

- Gurendrawati, E., Murdayanti, Y., & Indriani, S. (2019). Pengembangan Potensi SDM Pesantren Melalui Pelatihan Pemahaman dan Pengetahuan Pengelolaan Keuangan. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 20-36.
- ISAK No. 35 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba, Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo (2020).
- Listiyowati. (2021).
- Naz'aina, N., Raza, H., & Murhaban, M. (2023). Analysis of Accountability Determination in Bireuen Regency Islamic Boarding. *International Journal of Social Service and Research*, 3(1), 30-40.
- Niati, A., Suhardjo, Y., Wijayanti, R., & Hanifah, R. U. (2019). Pelatihan Pengelolaan Manajemen Keuangan dan Pelaporan Keuangan Akuntansi Pesantren bagi Pengelola Yayasan Pondok Pesantren X di Kota Semarang. *Jurnal Surya Masyarakat*, 2(1), 76-79.
- PSAK No. 1 Tentang Laporan Keuangan– edisi revisi 2015, Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo (2015).
- PSAK No. 45 Tentang Laporan Keuangan Entitas Nirlaba, Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo (2015).
- Usman, I. M. (2013). Pesantren sebagai lembaga pendidikan islam. *Jurnal Al Hikmah*, 14(1), 101-119.
- Wahyuningsih, H. K., & Afandy, D. (2018). Analisis Pelaporan Keuangan di Yayasan As-Salam Manado (Berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 101). *Jurnal Riset Akuntansi GoingConcern*, 13(2), 512-528.
- Yunika Murdayanti, dkk. Kompetensi SDM Keuangan dan Akuntabilitas Pesantren. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*. Vol. 7, No. 1, (2019), 19-29